

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesultanan Mataram berdiri tahun 1587 M. Lambat laun, kerajaan ini berkembang menjadi kekuatan dominan di Jawa. Kesultanan Mataram, mengalami kemunduran setelah wafatnya Sultan Agung pada tahun 1645 M. Kepemimpinan dan kebijakan politik Sultan Agung berhasil membawa Mataram pada masa kejayaan. Namun, setelah wafatnya, kepemimpinan Mataram tidak lagi memiliki tokoh yang sebanding dalam kecakapan dan visi. Amangkurat I (1646-1677), putra Sultan Agung berambisi menjalankan pemerintahan Mataram melampaui ayahnya. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, ia malah menjatuhkan Mataram ke dalam jurang kemunduran. Ia adalah raja pertama Mataram yang menjalin kerja sama dengan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), tujuannya adalah agar memodernisasi Mataram. VOC yang dianggap sebagai entitas yang dianggap negara maju. Namun, secara tidak langsung kebijakan ini telah membuka jalan bagi intervensi VOC di pedalaman Jawa.¹

Antara tahun 1677 hingga 1757 di Jawa memang mengalami banyak gejolak setelah kedatangan VOC yang

¹ Peter Brian Ramsay Carey, *The Power of Prophecy, The Power of Prophecy* (Leiden: KITLV Press, 2008). Hlm. 758.

merebut Jayakarta tahun 1619 dari Banten.² Kehadirannya mengganggu stabilitas beberapa monarki yang berdaulat di tanah Jawa, yakni Kesultanan Mataram, Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon.

Pengganti Amangkurat I, yaitu Amangkurat II (1677-1703) adalah raja Mataram pertama yang meminta bantuan militer terhadap VOC. Hal itu dikarenakan ia tidak memiliki apa pun untuk mengembalikan takhta Mataram dan eksistensi Mataram setelah kejatuhan keraton Plered di tangan Trunojoyo.³ Pada masa pemerintahannya, ia merasa dilema terhadap situasi di kerajaannya. Di satu sisi, ia harus mengembalikan kestabilan dan eksistensi kerajaan Mataram dengan bantuan VOC. Di sisi lain, ia harus berhadapan dengan penolakan dari sebagian besar elite kerajaan, termasuk patih dan beberapa bangsawan, terhadap kehadiran VOC di dalam kerajaan. Kebijakan politik Amangkurat II kadang berpihak kepada VOC, namun kadang juga memusuhi VOC. Masa pemerintahannya kedatangan Untung Suropati dan kelompok anti-VOC yang menggemparkan tanah Jawa. Secara diam-diam Amangkurat II yang dibujuk patihnya mengirim bantuan ke pasukan Suropati untuk menyerang pos-pos VOC.⁴ Ia meninggal 1703, sepinggal raja, Untung Suropati yang

² Capt. R. P. Suyono, *Seks Dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial: Penelusuran Kepustakaan Sejarah* (Jakarta: Grasindo, 2005). Hlm. 1.

³ Soedjipto Abimanyu, *Kitab Terlengkap Sejarah Mataram* (Yogyakarta: Saufa, 2015). Hlm. 102

⁴ Ny. Ratnawati Anhar, *Untung Surapati* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984). Hlm. 13.

berkuasa di Pasuruan masih melakukan perlawanan terhadap VOC.

Penerusnya, yakni Amangkurat III adalah seorang raja dengan citra yang buruk, meskipun begitu ia memusuhi kehadiran VOC di kerajaannya. Pamannya, Pangeran Puger yang ditindas oleh raja baru itu, memanfaatkan situasi dan berhasil menggulingkan Amangkurat III dari takhtanya. Tentu saja, hal tersebut berhasil karena adanya bantuan VOC.⁵ Pangeran Puger memerintah Kesultanan Mataram dengan gelar Paku Buwana I, pemerintahannya relatif lebih tenang. Namun kerajaan dan rakyat Mataram dibebani monopoli perdagangan oleh VOC. Wilayah bagian barat, seperti daerah Priangan dan Cirebon diserahkan ke VOC.⁶

Seiring berjalannya waktu, para penerusnya tidak bisa menjaga kestabilan kerajaan, akibat raja yang terlalu mementingkan posisinya, membuat kebijakan yang merugikan struktur sosial yang lain, serta tidak punya kecakapan dalam memerintah.

Hadirnya VOC dan ketidakstabilan politik di internal keraton menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, sehingga membentuk kelompok-kelompok kecil yang menggandeng anggota keluarga keraton yang satu pemikiran dengan masyarakat. Realisasinya adalah pemberontakan, salah satunya yang terjadi tahun 1742 Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning

⁵ Soedjipto Abimanyu, *Babad Tanah Jawi: Terlengkap Dan Terasli*, Edisi Pert (Yogyakarta: Laksana, 2017). Hlm. 414.

⁶ *Ibid.* Hlm. 95.

(cucu Amangkurat III) bersama laskar pemberontak dan orang-orang Tionghoa berhasil menduduki keraton Kartasura.⁷

Antara tahun 1677 hingga 1757 terjadi suksesi perebutan takhta sebanyak tiga kali. Pertama, terjadi pada tahun 1704-1708, antara Amangkurat III dengan Paku Buwana I.⁸ Kedua, terjadi pada tahun 1719-1723, antara Amangkurat IV melawan Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya.⁹ Ketiga, terjadi pada tahun 1747-1757, antara Paku Buwana II yang dilanjutkan oleh Paku Buwana III melawan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said.¹⁰

Pada 13 Februari 1755, Perjanjian Giyanti muncul sebagai peredam konflik, wilayah Mataram dibagi dua kerajaan. Pada masa itu, wilayah Mataram yang dahulu luas dipimpin Sultan Agung telah menyusut, terbatas hanya di sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, dua tahun kemudian, Raden Mas Said, yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut, melanjutkan perjuangannya melawan Pangeran Mangkubumi, mantan sekutunya. Konflik ini mencapai klimaksnya dengan

⁷ Orang-orang Tionghoa ini didorong keinginan untuk balas dendam atas tindakan VOC yang melakukan pembantaian di Batavia pada tahun 1740. Peristiwa pemberontakan orang-orang Tionghoa ini dikenal dengan *Geger Pecinan* yang berlangsung tahun 1740-1743: Lihat di Sri Sukirni, "Permukiman Tionghoa di Surakarta pada Tahun 1900-1940," *Ilmu Sejarah-S1* 415 (2017). Hlm. 3.

⁸ Theodoor Gautier Thomas Pigeaud, *Islamic States in Java 1500-1700, Islamic States in Java 1500-1700*, 1976. Hlm 103.

⁹ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, cetakan ke (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007). Hlm. 200.

¹⁰ Edi Sedyawati et al., *Sejarah Kebudayaan Jawa, Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993). Hlm. 17.

tercapainya Perjanjian Salatiga, yang berujung pembagian wilayah kembali.¹¹

Peristiwa pergolakan struktur sosial Mataram ini diindikasikan oleh kebijakan politik raja dan pengaruh VOC di dalamnya. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan raja dan VOC, seperti pengalihan sumber daya alam untuk keuntungan kolonial, membebani rakyat dengan membatasi mata pencaharian mereka dan memonopoli perdagangan. Ditambah, perlahan budaya tradisional dalam kerajaan berubah. Hal ini menyebabkan ketegangan sosial yang memunculkan perlawanan dari kalangan bangsawan dan rakyat.¹²

Penelitian yang akan dilakukan ini menitikberatkan kepada efek dari dinamika kebijakan politik yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, sehingga mempengaruhi struktur sosial yang selalu bergejolak di Mataram antara tahun 1677 sampai 1757. Penelitian ini juga memfokuskan pada serangkaian dinamika kebijakan politik dari tahun 1677-1757. Rakyat Mataram yang menjadi objek pemerintahan monarki dibuat menderita dengan berbagai kebijakan yang merugikan, sehingga menyebabkan timbulnya benih-benih pemberontakan, serta kemunduran kerajaan itu sendiri. Penelitian ini berfokus pada periode tahun 1677 hingga 1757. Pada tahun 1677, terjadi

¹¹ Dwi Ratna Nurhajarini, Tugas Triwahyono, dan Restu Gunawan, *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999). Hlm. 95.

¹² Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV Kemunculan Penjajahan Di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2019). Hlm. 49.

pemberontakan Trunojoyo yang melemahkan Kesultanan Mataram. Penelitian ini berakhir pada tahun 1757, ketika identitas Kesultanan Mataram terpecah menjadi tiga bagian: Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Praja Mangkunegaran.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian merupakan penentuan untuk batasan penelitian, dengan kata lain, ini mengartikan membatasi dan memusatkan lingkup permasalahan yang akan diselidiki dalam penelitian ini. Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini meliputi aspek waktu (temporal), lokasi (spasial), dan materi yang menjadi fokus utama dari penelitian tersebut.

Batasan temporal dalam penelitian ini lebih ditekankan pada kurun waktu 1677-1757. Peristiwa kedatangan VOC ke Nusantara memberikan ancaman bagi kerajaan-kerajaan yang ada, termasuk Kesultanan Mataram yang awalnya menolak kehadiran VOC dengan beberapa kali peperangan. Namun titik baliknya ialah ketika pada masa akhir pemerintahan Amangkurat I (1677), Kesultanan Mataram mulai menjalin hubungan dengan VOC, seterusnya VOC berkesinambungan menanamkan pengaruhnya terhadap Kesultanan Mataram, hingga membuat kesultanan tersebut terpecah lewat Perjanjian Giyanti (1755) dan Perjanjian Salatiga (1757). Dampaknya juga mengubah kondisi sosial masyarakat Kesultanan Mataram.

Batasan spasial penelitian ini berfokus pada wilayah Kesultanan Mataram. Batasan materi mengenai perubahan

kebijakan politik Kesultanan Mataram dan mengubah kondisi masyarakat pasca perpecahan Kesultanan Mataram.

C. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan politik Kesultanan Mataram antara tahun 1677-1757?
2. Bagaimana implementasi kebijakan politik Kesultanan Mataram antara tahun 1677-1757?
3. Bagaimana dampak kebijakan politik Kesultanan Mataram terhadap struktur sosial tahun 1677-1757?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan latar belakang dibuatnya kebijakan politik Kesultanan Mataram tahun 1677-1757.
2. Untuk mengetahui apa saja kebijakan politik Kesultanan Mataram pada tahun 1677-1757 yang berpengaruh besar terhadap struktur sosial.
3. Untuk menjelaskan dampak dari kebijakan politik di Kesultanan Mataram terhadap kondisi masyarakat tahun 1677-1757.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi penelitian-penelitian lain, terutama dalam konteks Sejarah Peradaban Islam. Penelitian ini juga diharapkan

menjadi referensi penting bagi para akademisi yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa di masa depan, membantu mereka dalam mengembangkan pemahaman dan analisis yang lebih mendalam terkait topik ini.

2. Manfaat Praktis

a. Akademik

Penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan dalam menambah khazanah pengetahuan sejarah tentang Kesultanan Mataram bagi mahasiswa yang mengambil jurusan Sejarah Peradaban Islam, Ilmu Sejarah, serta disiplin ilmu terkait lainnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan khazanah ilmiah dan pemahaman mendalam mengenai sejarah Kesultanan Mataram.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa berguna dalam menambah wawasan kepada khalayak umum yang ingin mengetahui masa lalu Kesultanan Mataram Islam, terkhusus pada kondisi sosial Kesultanan Mataram tahun 1677-1757.

F. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis karena mencakup periode 1677-1757, yang merupakan masa kemunduran Kesultanan Mataram Islam, karena terjadi gejolak pada struktur sosial yang berkepanjangan.

Dalam membahas mengenai kebijakan politik, maka harus memahami pula tentang Ilmu Politik. W.A. Robson

menyatakan bahwa Ilmu Politik berupaya memahami esensi kekuasaan dalam masyarakat, termasuk aspek-aspek fundamentalnya, proses-proses yang terlibat, cakupan topiknya, serta dampak-dampak yang dihasilkannya. Perhatian utama dalam penelitian ini terfokus pada dinamika perjuangan untuk memperoleh atau menjaga kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, atau memengaruhi orang lain, serta resistensi terhadap penyalahgunaan kekuasaan tersebut.¹³

Kebijakan dan politik memiliki pengertian yang berbeda. Kebijakan adalah serangkaian keputusan terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan oleh individu atau kelompok politik.¹⁴ Ilmuwan politik asal Kanada bernama David Easton mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan dari pemerintah atau pemimpin untuk membagi nilai-nilai kepada masyarakat atau kelompoknya.¹⁵ Kebijakan bukanlah keputusan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses yang lebih luas dan kompleks.¹⁶

Sementara politik adalah suatu perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan atau metode menjalankan kekuasaan.¹⁷

¹³ William Alexander Robson, *The University Teaching of Social Sciences: Political Science* (Paris: UNESCO, 1954). Hlm. 24.

¹⁴ Mirriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992). Hlm. 12.

¹⁵ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Yayasan Pancur Siwa, 2004). Hlm. 20.

¹⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021). Hlm. 21.

¹⁷ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Bina Cipta, 1980). Hlm. 35.

Jadi, dinamika kebijakan politik adalah rangkaian perubahan dan perkembangan dalam proses pembuatan keputusan oleh penguasa. Dinamika ini sering dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, serta perubahan dalam opini publik dan lingkungan politik. Perubahan tersebut bisa terjadi pada lingkup lokal hingga nasional, bahkan global.¹⁸

Dalam menjelaskan seorang pemimpin atau raja yang membuat kebijakan politik, penulis menggunakan *Rational Choice Theory* atau Teori Pilihan Rasional, James Coleman menjelaskan bahwa individu dan kelompok dalam politik bertindak berdasarkan kepentingan pribadi untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Dalam pengambilan keputusan, teori pilihan rasional menawarkan alat untuk berpikir logis dan rasional. Coleman menyadari bahwa individu tidak selalu berperilaku rasional dalam kehidupan nyata, tetapi teori ini tetap berlaku baik ketika individu bertindak sesuai dengan rasionalitas yang diharapkan maupun ketika mereka menyimpang darinya.¹⁹ Hal ini sesuai dengan tindakan para raja Mataram Islam tahun 1677-1757 yang mengeluarkan kebijakan politik atas dasar tujuan pribadi dan mengamankan posisinya sebagai penguasa.

Untuk memahami struktur sosial, diperlukan pemahaman tentang ilmu sosiologi. Menurut Selo Soemardjan

¹⁸ Hein de Haas et al., “Social Transformation,” *Faculty Research Working Paper Series* 28, no. July (2020): 457–73. Hlm. 10.

¹⁹ Douglas J. Goodman George Ritzer, *Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012). Hlm. 480.

dan Soelaiman Soemardi, sosiologi adalah studi tentang susunan dan struktur sosial, termasuk proses-proses perubahan sosial. Struktur sosial didefinisikan sebagai hubungan antara elemen-elemen fundamental dalam masyarakat, seperti norma, lembaga, kelompok sosial, dan strata sosial. Selo Soemardjan juga mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah proses dinamis dalam struktur sosial yang memengaruhi sistem sosial secara keseluruhan, termasuk nilai, sikap dan perilaku antar kelompok masyarakat.²⁰

Karl Marx menyatakan bahwa dalam struktur sosial terdapat dua kelas yang menempati posisi berbeda secara signifikan, yaitu kelas borjuis (wong gede) yang terdiri dari kaum bangsawan dan pemilik tanah, serta kelas proletar (wong cilik) yang merupakan masyarakat biasa yang sangat bergantung pada kelas borjuis.²¹

Dapat disimpulkan, bahwa struktur sosial merupakan sistem hubungan sosial yang terjalin di antara individu dalam suatu kelompok atau birokrasi. Sistem ini bersifat stabil, terorganisir, dan terbentuk secara selektif, dengan keteraturan yang dijaga melalui kontrol sosial. Dalam konteks ini, struktur sosial memiliki makna subjektif bagi setiap individu, di mana

²⁰ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial Di Yogyakarta* (Depok: Komunitas Bambu, 2009). Hlm. 293.

²¹ Karl Marx & Frederick Engels, *Manifesto of the Communist Party - and Its Genesis* (Ohio: Marxists Internet Archive, 2010). Hlm. 28-29.

mereka menjalankan peran tertentu sesuai dengan status yang mereka miliki dalam masyarakat.²²

Dalam membahas struktur sosial Mataram antara tahun 1677-1757, penulis menggunakan *Social Disorganization Theory* atau Teori Disorganisasi Sosial yang merupakan salah satu jenis dari *Social Structure Theory* atau Teori Struktur Sosial. Menurut Neil Joseph Smelser struktur sosial tersusun dari pola hubungan yang terbentuk dalam kelompok-kelompok sosial yang terorganisir, seperti keluarga hingga birokrasi pemerintahan.²³ Teori Disorganisasi Sosial yang dikembangkan oleh Clifford Shaw menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan melemahnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Menurut teori ini, perubahan sosial, konflik, dan ketidaksepakatan di antara anggota masyarakat turut berperan dalam merosotnya nilai-nilai tersebut.

Fenomena ini sejalan dengan struktur sosial dalam Kesultanan Mataram yang terbagi menjadi dua lapisan utama, yaitu kaum bangsawan dan rakyat biasa. Akan tetapi, berbeda dengan pandangan Karl Marx yang menilai bahwa konflik antara kelas borjuis dan proletar akan memicu revolusi untuk membentuk masyarakat tanpa kelas, konflik sosial di Kesultanan Mataram justru memperlihatkan dinamika yang berbeda. Dalam konteks tersebut, baik bangsawan maupun rakyat biasa turut merasakan dampak dari kebijakan politik raja.

²² Benjamin, Susetyo, and Handi Mulyaningsih, *Struktur Sosial* (Lampung: Pusaka Media, 2020). Hlm. 4.

²³ Neil Joseph Smelser, *Struktur Sosial Dan Mobilitas Dalam Pembangunan Ekonomi* (Yogyakarta: CV Nur Cahaya, 1984). Hlm. 65.

Bahkan, sebagian bangsawan yang merasa dirugikan bergabung dengan rakyat dalam upaya perlawanan terhadap raja atau bangsawan lainnya. Perlawanan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan keadilan dan ketenteraman kerajaan dan masyarakat.

G. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang Kesultanan Mataram sudah banyak ditemui, baik berupa buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas tentang Mataram Islam. Namun karya tersebut kebanyakan membahas mengenai kebijakan dan peran seorang rajanya, intervensi VOC di Mataram, serta penaklukan-penaklukan yang dilakukan Mataram. Tulisan tentang dinamika kondisi sosial Mataram jarang dibahas menjamah segi sistematis dan terstruktur dalam ranah akademik, hanya berbentuk deskripsi naratif. Dirasa perlu untuk membahas dinamika kondisi masyarakat dalam bentuk skripsi. Maka penelitian ini hadir diharapkan menyumbang informasi baru dan mendalam yang dapat memperkaya pemahaman tentang sejarah Mataram dari sisi sosialnya.

Berikut tulisan-tulisan yang merupakan penelitian terdahulu tentang Kesultanan Mataram yang relevan dengan studi yang akan dilakukan, yakni:

1. Skripsi dari UIN Sunan Kalijaga karya Muhammad As'ad tahun 2013 yang berjudul "*Kebijakan Militer Kerajaan Mataram 1613-1688 M*". Di dalamnya membahas tentang manajemen Kerajaan Mataram terhadap kebijakan militer

sampai dampak yang ditimbulkannya. Persamaan skripsi dengan penelitian ini adalah terletak pada lingkup pembahasan Kesultanan Mataram. Perbedaannya terletak pada materi dan rentang waktunya, di mana skripsi ini lebih fokus membahas tentang kebijakan militer

2. Skripsi dari UIN Sunan Kalijaga yang ditulis oleh Muhtadilah dengan judul “*Intervensi VOC dalam Suksesi di Istana Mataram 1677-1757*” yang ditulis tahun 2015. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai konsep suksesi kekuasaan dan konflik yang terjadi di Mataram serta dampak yang ditimbulkan dari intervensi VOC terhadap Mataram. Persamaannya terletak dalam pembahasan tentang pemerintahan Kesultanan Mataram. Perbedaan tulisan ini dengan yang akan diteliti adalah dari segi variabel, tulisan ini lebih berfokus pada intervensi VOC di Mataram dan pola kekuasaan serta suksesi raja-raja Mataram.
3. Skripsi dari Universitas Jember yang ditulis oleh Komar Faridi tahun 2017 dengan judul “*Dinamika Kerajaan Mataram Islam Pasca Perjanjian Giyanti Tahun 1755-1830*”. Skripsi ini membahas tentang Dinamika Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Kartasura hasil pecahan Mataram lewat Perjanjian Giyanti tahun 1755, pembahasannya terkait budaya dan keagamaan dilingkungan masing-masing kerajaan. Persamaan skripsi dengan penelitian ini adalah lingkup pembahasan tentang Kesultanan Mataram. Sementara perbedaannya terletak pada materi yang dibahas.

4. Skripsi yang berjudul “*Perseteruan Antara Amangkurat II dan Pangeran Puger serta Dampaknya Terhadap Kerajaan Mataram Islam Tahun 1677-1757 M*” karya Suci Haryati dari UIN Sunan Kalijaga tahun 2020. Isi yang terkandung dalam skripsi tersebut adalah fokus terhadap konflik antara Amangkurat II dan Pangeran Puger yang berdampak pada melemahnya Mataram Islam. Tidak membahas secara menyeluruh mengenai suksesi dan kondisi sosial yang disebabkan dari konflik tersebut. Persamaannya dengan penelitian ini terletak dalam kurun waktu yang sama. Perbedaannya terletak dalam pembahasannya, di mana skripsi di atas menjelaskan tentang dampak dari perseteruan antara Amangkurat II dan Pangeran Puger.
5. Skripsi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang ditulis oleh Encep Muhidin Gentar Alam tahun 2021 dengan judul “*Politik Ekonomi VOC Di Kerajaan Mataram Pada Masa Amangkurat II Tahun 1677- 1700*”. Di dalamnya membahas tentang gambaran umum kerajaan Mataram dari tahun 1645-1700, mengambil tokoh Amangkurat II sebagai objek yang diteliti mengenai kebijakan monopoli dan campur tangan VOC dalam kerajaan Mataram. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas lingkup Kesultanan Mataram. Pembeda dengan penelitian yang akan digarap adalah pada batasan waktu dan variabelnya.
6. Skripsi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “*Peran Amangkurat I (1646-1677) dalam Kebijakan Ekonomi Kerajaan Mataram*” yang ditulis oleh Syamsuri

Ma'sum tahun 2023. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai perkembangan Mataram Islam dan biografi Amangkurat I beserta kebijakan ekonominya terhadap kerajaan Mataram. Persamaannya terletak dalam lingkup pembahasan salah satu raja Kesultanan Mataram. Pembedanya terdapat dalam materi yang dibahas dan batasan waktunya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian sejarah merupakan suatu langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis data-data sejarah secara sistematis, fokus pada periode tertentu di masa lampau, serta terstruktur dalam beberapa tahap sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam kajian metodologi sejarah. Jadi, metode penelitian sejarah adalah sebuah metode atau tata cara demi memperoleh relevansi sejarah.²⁴

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, secara penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) atau bisa disebut sebagai penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan tertulis.²⁵

²⁴ Wasino and Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah (Dari Riset Hingga Penelusuran, Seri Publikasi Pembelajaran* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018). Hlm. 11.

²⁵ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, Penerbit Ombak (Yogyakarta, 2011). Hlm. 102-103.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan lima langkah metodologis, yakni: pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi, interpretasi, dan historiografi.²⁶

1. Pemilihan Topik

Pada langkah ini penulis memilih topik penelitian yang bertujuan agar bisa mempermudah tahap selanjutnya, serta dapat terarah sesuai dengan sasaran.²⁷ Penulis menggarap judul penelitian **“DINAMIKA KEBIJAKAN POLITIK KESULTANAN MATARAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP STRUKTUR SOSIAL TAHUN 1677-1757”**. Topik penelitian tentang Mataram Islam kebanyakan pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai rajanya, penaklukan wilayah, serta kebijakan yang dikeluarkan raja. Penulis memilih topik tersebut, sebagai pelengkap kekurangan dari penelitian sebelumnya dan mencoba menyempurnakan sejarah tentang Mataram Islam.

2. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *”heuriskein”* yang artinya tidak hanya menemukan, tetapi mencari terlebih dahulu.²⁸ Dalam konteks ini, penulis mengumpulkan berbagai jenis sumber yang relevan dengan objek penelitian.

²⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995). Hlm. 89.

²⁷ Anwar Sanusi, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Cirebon: Syekh Nurjati Press, 2013). Hlm. 137.

²⁸ Nina Herlina, *Metode Sejarah Edisi Revisi 2020*, Cetakan kedua (Bandung: Satya Historika, 2018). Hlm. 2.

Sumber-sumber tersebut terdiri dari sumber primer dan sekunder.

Sumber primer dimaknai sebagai sebuah sumber yang berasal dari tangan pertama atau kesaksian atas suatu peristiwa tertentu dari masa yang sama dengan objek penelitian.²⁹ Penelitian ini memakai sumber primer *Sastra Gendhing* yang ditulis oleh Sultan Agung pada abad ke-17, *Babad Tanah Jawi*, *Babad Giyanti* dan *Babad Kartasura* yang ditulis pada abad ke-18 dan ke-19, serta dokumen-dokumen masa lalu seperti Perjanjian Giyanti (1755) dan Perjanjian Salatiga (1757). Di sisi lain, sumber sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel yang membahas atau menganalisis objek penelitian, memberikan konteks tambahan dan perspektif yang lebih luas tentang topik yang sedang dikaji.

Penulis mengakses sumber primer dan sekunder dari observasi langsung ke tempat peninggalan Kesultanan Mataram, serta penulis juga menyambangi perpustakaan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Perpustakaan Nasional Indonesia, ditambah penulis mendapatkan sumber terkait melalui internet berupa *e-book* atau artikel lainnya guna menunjang penelitian yang akan ditulis. Selain itu, penulis juga membeli buku-buku sebagai sumber rujukan di toko buku dan toko *online* yang menyajikan kebutuhan penulis.

²⁹ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah : Metode Dan Praktik* (Gresik: JSI Press, 2020). Hlm. 49.

3. Verifikasi

Data-data yang diakses penulis kemudian akan dikritik atau verifikasi agar memperoleh validasi akan keabsahan sumber.³⁰ Tahapan ini meliputi kritik eksternal dan kritik internal, kritik terhadap sumber-sumber tersebut untuk menilai keandalan, ketepatan, dan bias potensial. Kritik eksternal digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek luar dari sebuah sumber, seperti menilai keaslian dengan menganalisis elemen fisik dalam pengerjaan sumber sejarah, seperti prasasti, dokumen, dan naskah.³¹ Sebaliknya, kritik internal berfungsi untuk menilai keandalan sumber dengan cara membandingkan isinya dengan sumber-sumber lain, sehingga memungkinkan penilaian yang lebih akurat mengenai kebenaran dan keakuratan data yang terdapat dalam sumber tersebut.

4. Interpretasi

Selanjutnya adalah tahap interpretasi atau penafsiran, pada tahap ini peneliti menafsirkan hasil sumber dari tahap sebelumnya dengan cara seobjektif mungkin seperti mencantumkan sumber yang peneliti gunakan.³² Pada tahap ini peneliti menafsirkan sumber data yang telah diuji sebelumnya, guna menyusun tulisan baru yang lebih rinci dan mudah dipahami.³³

³⁰ *Ibid.* Hlm. 102.

³¹ Anwar Sanusi, *Op. Cit.* Hlm. 137.

³² Muhamad Arif, *Pengantar Kajian Sejarah* (Bandung: Yrama Widya, 2011). Hlm. 85.

³³ Abdurahman, *Op. Cit.* Hlm. 5.

Dalam tahapan interpretasi peneliti melakukan dua hal, yakni menganalisis dan mensintesis. Analisis adalah mengurai sumber-sumber yang terdapat berbagai kemungkinan di dalamnya.³⁴ Peneliti mencoba mengurai dinamika politik dan kondisi sosial Kesultanan Mataram tahun 1677-1757. Kemudian peneliti mensintesis dengan cara mengambil kesimpulan tentang dinamika kondisi sosial Kesultanan Mataram.

5. Historiografi

Tahap terakhir adalah menyajikan penulisan sejarah. Historiografi sebagai penulisan sejarah merupakan satu kesatuan dalam metodologi sejarah.³⁵ Peneliti menghasilkan laporan hasil penelitian sejarah yang memberi gambaran jelas proses penelitian, menggabungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya dalam bentuk bab per bab dan sub bab per sub bab. Mulai dari pendahuluan, isi hingga kesimpulan. Penelitian ini akhirnya bisa menghasilkan tulisan sejarah yang sistematis dan kronologis.

I. Sistematika Penelitian

Penelitian sejarah ini disusun dalam bagian utama: Pendahuluan, Isi, dan Kesimpulan. Isi dari penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa sub bab yang saling terkait dan terperinci. Sistematika ini memungkinkan pembaca untuk memahami secara

³⁴ Herlina, *Op. Cit.* Hlm. 123.

³⁵ Setia Gumilar, *Historiografi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern* (Bandung: Pustaka Setia, 2017). Hlm. 3.

menyeluruh semua aspek yang dibahas dalam penelitian, dari pengantar, eksplorasi topik utama, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang ditemukan.

Bab satu merupakan pendahuluan yang akan memaparkan gambaran umum. Pada bab ini terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan. Penjelasan yang lebih rinci mengenai pokok pembahasan akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Bab dua membahas deskripsi umum tentang Kesultanan Mataram, termasuk sistem pemerintahan, kebijakan politik, dan kondisi sosial. Penjelasan ini penting untuk memahami dinamika berbagai aspek, terutama sosial dan politik, di Mataram dari masa kemunduran pada tahun 1677 hingga terpecahnya kesultanan pada tahun 1757.

Selanjutnya, bab tiga menjelaskan dinamika kebijakan politik Kesultanan Mataram (1677-1757), yang diikuti oleh perkembangan kebijakan politik, faktor yang memengaruhi kebijakan, dan raja-raja Mataram Islam dari tahun 1677-1757. Maksud dari pembahasan bab ini memberi pengantar ke bab selanjutnya, yaitu bagaimana dinamika politik pada saat Kesultanan Mataram dalam masa kemunduran.

Bab empat menguraikan tentang pengaruh kebijakan politik terhadap struktur sosial. Dalam hal ini menyangkut perubahan dalam struktur sosial, dampak sosial dari kebijakan politik dan analisis perubahan sosial yang terjadi. Penjelasan

mengenai bab ini adalah menggali bagaimana kebijakan politik berinteraksi dengan aspek-aspek sosial, dan bagaimana interaksi ini membentuk struktur masyarakat pada periode berikut. Bagian ini menjadi klimaks dari penelitian.

Terakhir, bab lima berisi kesimpulan dan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selanjutnya terdapat saran yang diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

